

PELAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyampaikan laporan kinerja secara periodik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Dengan berpedoman pada kedua regulasi tersebut, laporan kinerja triwulan memiliki kedudukan yang strategis, bukan hanya sebagai kewajiban administrasi, tetapi juga sebagai alat pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Laporan Kinerja triwulan IV tahun 2025 ini merupakan ikhtisar yang menggambarkan secara ringkas tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Pada Triwulan IV tahun 2025 Bapperida Kabupaten Tanah Laut melakukan perbaikan Pohon Kinerja atas Arahan dan masukan dari Kementerian PANRB. Beberapa perubahan yang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SEBELUM

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				REALISASI & CAPAIAN KINERJA											CAPAIAN KINERJA TAHUNAN (%)	PENGAMPU
				TAH UN AN	TRI WULAN				TAHUN AN	TRI WULAN										
					I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH																			
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten komponen Perencanaan (Meningkat Pada)	Nilai	24	-	-	-	24	23,98	-	-	-	-	-	-	23,98	99,917%	99,917%	Kepala Bapperida	
2	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sasaran Perangkat Daerah Yang Memenuhi Target (Meningkat Pada)	Persen	71,4	-	-	-	71,4	71,4	-	-	-	-	-	-	71,4	100%	100%	Kepala Bapperida	
3	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Meningkat Pada)	Angka	55,8	-	-	-	55,8	56,4	-	-	-	-	-	-	56,4	101,075 %	101,075 %	Kepala Bapperida	

SESUDAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				REALISASI & CAPAIAN KINERJA												CAPAIAN KINERJA TAHUNAN (%)	PENGAMPU
				TAHU NAN	TRIWULAN				TAHU NAN	TRIWULAN											
					I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH																				
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP komponen Perencanaan	Nilai	24	-	-	-	24	23,98	-	-	-	-	-	-	23,98	99,917%	99,917%	Kepala Bapperida		
		MRI	Nilai	3.05	-	-	-	3.05	3,106	-	-	-	-	-	-	3,106	101,836%	101,836%	Kepala Bapperida		
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	Nilai	21.6	-	-	-	21.6	20,71	-	-	-	-	-	-	20,71	95,88%	95,88%	Kepala Bapperida		
3	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Angka	55,8	-	-	-	55,8	56,4	-	-	-	-	-	-	56,4	101,075%	101,075%	Kepala Bapperida		

Pencapaian kinerja pada periode ini menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, ditinjau berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan atas pencapaian kinerja sasaran yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

a. Nilai SAKIP komponen Perencanaan

SAKIP merupakan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB. Komponen yang dinilai terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Nilai SAKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented program*).

Nilai SAKIP komponen perencanaan merupakan Penilaian terhadap sejauh mana instansi pemerintah telah menyusun rencana kinerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi. Dalam penilaian komponen Perencanaan Kinerja terdapat beberapa aspek, seperti:

- Dokumen Perencanaan: Ketersediaan dan kualitas dokumen perencanaan strategis (Renstra) serta dokumen perencanaan tahunan (Renja, Perjanjian Kinerja).
- Kesesuaian Target dan Tujuan: Seberapa baik target dan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sejalan dengan sasaran pembangunan yang lebih tinggi.
- Penggunaan Indikator Kinerja: Penggunaan indikator kinerja yang tepat dan terukur untuk memantau pencapaian kinerja.

b. MRI

Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah alat ukur untuk menilai kualitas, efektivitas, dan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di suatu organisasi atau instansi pemerintah. MRI yang diukur oleh BPKP mengevaluasi parameter seperti kepemimpinan, kebijakan, proses dan sumber daya manusia. Indeks ini membantu mengidentifikasi area perbaikan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada Tahun 2025 terjadi Pergeseran kewenangan pengelolaan Indikator Manajemen Risiko Indeks di Kabupaten Tanah Laut yang sebelumnya berada di Inspektorat menjadi di Bapperida. Jika pada periode

sebelumnya indikator Manajemen Risiko dikelola oleh Inspektorat dengan fokus utama pada fungsi pengawasan, audit dan kepatuhan (assurance). maka mulai tahun 2025. tanggung jawab tersebut dialihkan ke Bapperida. Hal ini menandakan bahwa manajemen risiko kini dipandang sebagai bagian integral dari proses perencanaan pembangunan yang proaktif, bukan sekadar instrumen evaluasi di akhir kegiatan Portal Resmi Kabupaten Tanah Laut mencerminkan arah kebijakan ini untuk memperkuat fondasi pembangunan. Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kabupaten Tanah Laut diperoleh dari hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

2. Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan

a. Nilai SAKIP Komponen Pengukuran

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komponen Pengukuran Kinerja merupakan tahap krusial untuk memantau realisasi atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Nilai pada komponen ini diberikan berdasarkan tiga sub-komponen utama:

- Pemenuhan Pengukuran: Ketersediaan pedoman teknis pengukuran. penetapan indikator kinerja utama (IKU). dan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK).
- Kualitas Pengukuran: Ketepatan pemilihan indikator (memenuhi kriteria SMART) dan keandalan data kinerja yang dikumpulkan untuk mendukung capaian target.
- Implementasi/Pemanfaatan: Sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk pengendalian kinerja berkala (bulanan/triwulanan). pemberian reward/punishment. serta penyesuaian strategi (refocusing) organisasi.

Keberhasilan pada komponen pengukuran ini sangat menentukan efisiensi penggunaan anggaran. karena setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dibuktikan hasil kinerjanya melalui data yang terukur.

3. Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah

a. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IID disusun oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam

Negeri, sebagai alat untuk mengevaluasi dan memotivasi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar terus berinovasi.

Penilaian Indeks Inovasi Daerah mencakup beberapa aspek, termasuk:

- Inovasi tata kelola pemerintahan: Meliputi inovasi dalam manajemen internal, fungsi manajemen, dan pengelolaan unsur manajemen.
- Inovasi pelayanan publik: Meliputi proses pemberian layanan barang dan jasa kepada publik.
- Inovasi dalam bentuk lainnya: Meliputi inovasi yang terkait dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Bagi daerah yang berhasil menerapkan inovasi terbaik, Kemendagri memberikan penghargaan yang dikenal sebagai Innovative Government Award (IGA). Hasil penilaian IID dikelompokkan ke dalam beberapa kategori predikat, seperti Sangat Inovatif, Inovatif, dan Kurang Inovatif. Hasil ini bertujuan untuk mendorong daerah agar terus meningkatkan inovasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pendampingan penyusunan Pohon Kinerja oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Akuntabilitas Aparatur. dan Pengawasan II

Sehubungan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut dan Renstra SKPD Tahun 2025 - 2029. maka dilaksanakan pendampingan penyusunan Pohon Kinerja oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Akuntabilitas Aparatur. dan Pengawasan II. Perbaikan pohon kinerja bertujuan memastikan terciptanya keselarasan yang logis dan terukur antara visi. misi. dan tujuan besar dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut dengan sasaran strategis pada Renstra SKPD hingga ke level individu.

2. Bimtek RPJMD dan Renstra Serta Implementasinya pada Aplikasi Simpun

Kegiatan strategis ini dilaksanakan secara intensif pada tanggal 27 – 30 Agustus 2025 bertempat di Jakarta. dengan menghadirkan Kasubbag Perencanaan /

Operator SIMPUN dari seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Penyelenggaraan Bimtek ini menjadi momentum krusial untuk memastikan transisi perencanaan lima tahunan berjalan secara akuntabel dan berbasis digital. Melalui pelaksanaan Bimtek yang terpadu di Jakarta ini, Kabupaten Tanah Laut menunjukkan komitmen tinggi dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas tinggi, transparan, dan sepenuhnya terintegrasi secara digital.

3. Sosialisasi Perencanaan (Penyelarasan Cascading Kinerja SKPD dengan Pohon Kinerja pada Aplikasi SIMPUN)

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari pada Senin – Selasa, 10 s.d. 11 November 2025 ini, mengambil tempat di Atlas Cafe dan Resto guna menciptakan suasana diskusi yang lebih komunikatif dan produktif. Sosialisasi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa hasil asistensi Kementerian PANRB mengenai Pohon Kinerja tidak hanya berhenti pada dokumen fisik, melainkan terinternalisasi sepenuhnya ke dalam sistem digital daerah. Melalui pendekatan yang lebih personal di Atlas Cafe dan Resto, diharapkan para perencana SKPD dapat lebih leluasa melakukan konsultasi teknis terkait kendala penginputan, sehingga proses transisi menuju perencanaan berbasis digital dapat tuntas tepat waktu demi mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang lebih modern dan efektif.

4. Sosialisasi serta Bimbingan Teknis Manajemen Resiko Dokumen RPJMD dan Renstra Tahun 2025 – 2029

Mengacu pada peralihan kewenangan pengelolaan Indikator Manajemen Risiko Indeks dari Inspektorat ke Bapperida mulai tahun 2025 maka Bapperida Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Sosialisasi serta Bimbingan Teknis Manajemen Resiko Dokumen RPJMD dan Renstra Tahun 2025 – 2029 di Hotel Grand Qin Banjarbaru pada hari Senin – Kamis tanggal 27-30 Oktober 2025. Harapan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya Perencanaan Berbasis Risiko (Risk-Based Planning): Diharapkan setiap SKPD tidak lagi menyusun program secara "rutinitas", melainkan sudah memperhitungkan potensi hambatan (risiko) sejak awal, sehingga target dalam RPJMD 2025–2029 lebih realistis dan dapat dicapai.

5. Pengukuran kinerja secara berkala setiap triwulan melalui aplikasi SIMPUN.

Pengukuran triwulan dilakukan melalui pengumpulan data capaian indikator kinerja membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan tahunan.

Berdasarkan hasil pengukuran triwulan, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengidentifikasi tingkat capaian serta kendala yang dihadapi. Pelaksanaan monev dilakukan melalui rapat koordinasi bersama perangkat daerah, verifikasi data dukung, serta analisis terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

6. Penyelenggaraan Tanah Laut Innovation Award

Bapperida kabupaten Tanah Laut mengadakan kompetisi tahunan ini untuk menjangkau ide kreatif dari berbagai kategori yaitu SKPD, Kecamatan, Puskesmas, Pengajar dan Masyarakat. Pembukaan Tala Innovation Award dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober tahun 2025 dan Penutupannya dilaksanakan pada 16 Desember tahun 2025.

Jumlah partisipan inovasi daerah yang dilaksanakan tercatat sebanyak 102 inovasi, yang terdiri atas 37 inovasi SKPD, 8 inovasi kecamatan, 15 inovasi puskesmas, 32 inovasi pengajar SMP, dan 10 inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat. Pemenang Inovasi Daerah tahun ini terdiri dari berbagai kategori, yaitu kategori SKPD yang diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui inovasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi dengan Desa (SILARIS), kategori kecamatan yang dimenangkan oleh Kecamatan Bati-Bati dengan inovasi SI ADING KAKA (Sistem Informasi Aplikasi Dispensasi Nikah Terintegrasi Kecamatan Bati-Bati dan KUA), kategori puskesmas yang diraih oleh Puskesmas Takisung melalui program BERAKAT (Benar Caranya Akurat Hasilnya), kategori pengajar SMP yang dimenangkan oleh SMP Negeri 5 Batu Ampar melalui inovasi Media Pecahan, serta kategori masyarakat yang diraih oleh Anton Kuswoyo melalui inovasi Ferma Feed (Pakan Lengkap Fermentasi Berbasis Indigofera, Jerami Padi, dan Konsentrat Lokal). Keseluruhan inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, mendorong efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah, serta memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

HAMBATAN

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan SAKIP periode ini adalah sebagai berikut:

1. **Belum Tuntasnya perbaikan Pohon Kinerja SKPD**
Masih terdapat beberapa SKPD yang belum menyelesaikan penyesuaian Pohon Kinerja hasil desk dengan Kemenpan RB ke dalam dokumen Renstra dan aplikasi SIMPUN.
2. **Masa Transisi Dokumen Perencanaan (RPJMD & Renstra 2025-2029)**
Perubahan visi, misi, dan nomenklatur pada periode perencanaan baru menuntut penyesuaian besar-besaran pada seluruh dokumen SKPD. Proses adaptasi ini membutuhkan waktu dan ketelitian tinggi agar tidak terjadi inkonsistensi data.
3. **Masa Transisi Kewenangan pengelolaan Indikator Manajemen Risiko Indeks di Kabupaten Tanah Laut**
Peralihan indikator ini dari Inspektorat ke Bapperida di tahun 2025 memerlukan waktu penyesuaian. Kegagalan bisa muncul jika koordinasi antara Bapperida (sebagai perencana risiko) dan Inspektorat (sebagai auditor risiko) tidak berjalan harmonis, yang mengakibatkan standar penilaian yang digunakan menjadi membingungkan bagi SKPD pelaksana.
4. **Meskipun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengintegrasikan proses perencanaan hingga pengukuran melalui Aplikasi SIMPUN, kendala teknis atau rendahnya ketaatan penginputan data oleh Perangkat Daerah tetap menjadi faktor penghambat nilai. Data yang tidak up-to-date dalam sistem mengakibatkan laporan kinerja tidak kredibel.**
5. **Infrastruktur digital terbatas. Banyak daerah di Tanah Laut belum terjangkau jaringan internet stabil, menghambat inovasi berbasis online seperti aplikasi SILAKAS.**
6. **Hambatan umum di kabupaten. Regulasi tumpang tindih, kurangnya political will di beberapa level, koordinasi antar-SKPD yang belum maksimal, serta tantangan geografis di daerah kepulauan/pedesaan.**

RENCANA AKSI

Untuk lebih meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, beberapa langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

1. Menyelenggarakan Final Desk untuk mengunci Pohon Kinerja yang telah selaras dengan hasil asistensi Kemenpan RB.
2. Memberikan apresiasi atau Reward kepada SKPD dengan kualitas dokumen perencanaan terbaik dan tercepat dalam penyelesaiannya.
3. Penguatan Asistensi dan Bimtek Berkelanjutan
Aksi: Menindaklanjuti Bimtek di Hotel Grand Qin Banjarbaru dengan sesi klinis pendampingan penyusunan Risk Register per SKPD.
Tujuan: Memastikan aparatur perencana memiliki kompetensi teknis dalam membedakan antara kejadian risiko dan penyebabnya. sehingga mitigasi yang disusun menjadi lebih presisi.
4. Mengintegrasikan kepatuhan penginputan data di Aplikasi SIMPUN dengan pemberian Reward & Punishment.
5. Perkuat infrastruktur → Kolaborasi dengan provinsi/pusat untuk perluasan jaringan internet dan penyediaan gadget subsidi bagi masyarakat/pegawai.
6. Sinergi lintas sektor → Tingkatkan kolaborasi dengan BRIDA Provinsi Kalsel dan partisipasi masyarakat dalam lomba inovasi untuk menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif.

B. REALISASI KEUANGAN

Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp. 15.632.675.105,39**

**Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAPPERIDA Tahun Anggaran 2025 TW IV**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI TW IV 2025 (Rp)	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BELANJA OPERASI	14.303.758.731,39	11.992.339.536,00	83,84
	Belanja Pegawai	8.474.080.326,00	7.268.720.003,00	85,78
	Belanja Barang dan Jasa	5.829.678.405,39	4.723.619.533,00	81,03
2	BELANJA MODAL	1.036.409.528,61	1.181.137.000,00	88,88
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	708.916.374,00	571.903.000,00	80,67
	Belanja Modal Aset Lainnya	620.000.000,00	609.234.000,00	98,26
	Jumlah Belanja	15.632.675.105,39	13.173.476.536,00	84,27

**Sumber/Pengolah Data dari Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 202*

C. PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan IV Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan IV tahun 2025. Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Triwulan IV Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah masih belum memenuhi target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih di bawah target. Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Demikian laporan kinerja Triwulan IV Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut ini dibuat, semoga dapat menjadi salah satu bahan yang dapat memberikan data dan informasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada periode triwulan yang akan datang.

Pelaihari, 02 Februari 2026

**Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Tanah Laut**



Afrizal Akbar. SH

Pembina / IV a

NIP. 19810403 200212 1 008

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025
 TRIWULAN IV
 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

P

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	SKPD Penanggungjawab	Keterangan							
							I	II	III	IV																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/100%			14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16	17									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah (Persen)	100.00	64,337,612,486	100.00	10,984,592,636	100	12,550,505,543	-	2,052,145,651	-	2,677,213,775	88	2,757,739,925	-	3,166,898,810	88	10,653,998,161	88.10%	84.89%	0.00	21,638,590,797	-	33.63%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	86.20		81.40		81.7		-		-		83		-		83		101.90%		0.00					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah (%)	100.00	85,582,831		35,107,100	100	11,999,273	-	2,165,000	-	-	-	3,962,400	100	1,578,400	100	7,705,800	100.00%	64.22%	0.00	42,812,900	0.00%	101.38%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		43,889,277		6,404,900	7	6,999,531	2	1,625,000	2	-	2	2,208,400	1	650,000	7	4,483,400	100.00%	64.05%	7.00	10,888,300	0.00%	24.81%	Tidak Ada	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		41,693,554	5.00	28,702,200	3	4,999,742	1	540,000	1	-	-	1,754,000	1	928,400	3	3,222,400	100.00%	64.45%	8.00	31,924,600	0.00%	76.57%	Tidak Ada	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah (%)	100.00	46,570,862,203		6,846,755,132	100	8,486,229,279	-	1,662,932,813	-	2,166,683,796	88	1,549,589,597	-	1,898,849,797	88	7,278,056,003	88.10%	85.76%	0.00	14,124,811,135	0.00%	54.41%		
		Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menemima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	44.00	46,501,953,807	137.00	6,839,504,632	44	8,474,080,326	36	1,660,985,213	44	2,166,683,796	44	1,544,887,597	40	1,896,163,397	164	7,268,720,003	100.00%	85.78%	301.00	14,108,224,635	684.09%	30.34%	Tidak Ada	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.00	68,908,396	5.00	7,250,500	5	12,148,953	3	1,947,600	2	-	-	4,702,000	-	2,686,400	5	9,336,000	100.00%	76.85%	10.00	16,586,500	200.00%	24.07%	Tidak Ada	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)	100.00	1,663,944,771		115,910,000	100	610,575,500	-	-	-	-	83	240,000,000	-	30,800,000	83	270,800,000	83.30%	44.35%	0.00	386,710,000	0.00%	58.12%		
		Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		140,865,260	99.00	20,000,000	44	35,575,500	-	-	-	-	-	-	44	30,800,000	44	30,800,000	100.00%	86.58%	143.00	50,800,000	0.00%	36.06%	Tidak Ada	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50.00	1,523,079,511	16.00	95,910,000	99	575,000,000	-	-	-	-	-	240,000,000	40	-	40	240,000,000	40.40%	41.74%	56.00	335,910,000	112.00%	22.05%	Tidak Ada	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)		10,134,715,751		3,291,907,105	100	2,442,813,065	-	240,896,466	-	356,760,469	83	834,353,129	-	809,172,944	83	2,241,183,008	83.30%	91.75%	0.00	5,533,090,113	0.00%	274.13%		
		Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.00	144,048,193	1.00	18,413,220	1	24,900,342	-	4,805,980	1	4,947,500	1	3,551,000	1	8,108,500	1	21,412,980	100.00%	85.99%	2.00	39,826,200	200.00%	27.65%	Tidak Ada	
		Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	13.00	2,416,063,634	13.00	743,786,196	10	733,591,965	1	18,992,500	-	34,460,200	-	235,031,500	9	305,275,000	10	593,759,200	100.00%	80.94%	23.00	1,337,545,398	176.92%	55.36%	Tidak Ada	
		Persediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.00	179,447,999	1.00	17,557,100	1	31,426,032	1	4,629,700	-	8,824,500	-	-	-	10,515,000	1	23,969,200	100.00%	76.27%	2.00	41,526,300	200.00%	23.14%	Tidak Ada	
		Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.00	180,631,017	4.00	46,625,200	5	46,854,488	1	11,765,000	1	9,033,000	1	5,012,200	1	7,842,200	4	33,652,400	80.00%	71.82%	8.00	80,277,600	266.67%	44.44%	Tidak Ada	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	SKPD Penanggungjawab	Keterangan												
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase risk register strategis perangkat daerah yang selaras dengan risk register strategis pemda (Persen)	100.00		0.00				-	-			-	-	-	-			0.00%		0.00					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah						
			Persentase Program Prioritas RPJMD yang terkawal dalam RKPD (Persen)	100.00		0.00		100		-	-		100	-	-		100		100.00%		0.00												
			Persentase Renstra selaras dengan RPJMD (Persen)	100.00		0.00		100		-	-		100	-	-		100		100.00%		0.00												
			Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang memiliki RTP (Persen)	100.00	3,826,474,523	0.00	839,499,070		1,170,418,672		136,437,757		126,482,010		278,078,660		247,949,300		788,947,727	0.00%	67.41%	0.00	1,628,446,797		42.56%								
			Persentase Program Perangkat Daerah yang tercapai (Persen)	74.00		0.00		70		-	-		-		70		70		100.00%		0.00												
			Persentase Renja Selaras dengan RKPD Persentase Renja Selaras dengan RKPD (Persen)	100.00		0.00		100		-	-		100	-	-		100		100.00%		0.00												
			Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Persen)	26.00		0.00		20		-	-		23	-	-		23		114.00%		0.00												
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar (Persen)					100		-	-		100	-	-		-		0.00%		0.00			0.00%									
			Persentase Usulan Masyarakat sesuai Iku Strategis/Program Prioritas (Persen)		2,832,602,364		733,064,070	20	995,477,935		125,387,757		126,482,010		261,778,660	20	202,424,300	716,072,727	100.00%	71.93%	0.00	1,449,136,797		0.00%	51.16%								
			Jumlah dokumen risk register pemerintah daerah yang tersusun tepat waktu (Dokumen)					0		-	-		-	-	-	-	-		0.00%		0.00			0.00%									
			Jumlah Dokumen risk register perangkat daerah yang tersusun tepat waktu (Dokumen)					0		-	-		-	-	-	-	-		0.00%		0.00			0.00%									
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	2.00	2,832,602,364	3.00	733,064,070	3	995,477,935	-	125,387,757	3	126,482,010	3	261,778,660	3	202,424,300	716,072,727	100.00%	71.93%	6.00	1,449,136,797	300.00%	51.16%				Tidak Ada					
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil Monev yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah (Persen)		993,872,159		106,435,000	75	174,940,737	-	11,050,000	-	-	16,300,000	75	45,525,000	75	72,875,000	100.00%	41.66%	0.00	179,310,000	0.00%	18.04%									
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4.00	993,872,159	9.00	106,435,000	8	174,940,737	-	11,050,000	2	-	6	16,300,000	8	45,525,000	8	72,875,000	100.00%	41.66%	17.00	179,310,000	425.00%	18.04%			Tidak Ada					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	67.41%												
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sedang												
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)	100.00		0.00		100		-	50		100	-			100		100.00%		0.00						Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah						
			Persentase Renstra selaras dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen)	100.00		0.00		100		-	50		100	-			100		100.00%		0.00												

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	SKPD Penanggungjawab	Keterangan							
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase Program Prioritas RPJMD yang terkawal dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)	100.00		0.00		100		-		-		100		-		100		100.00%		0.00					
			Persentase Program Perangkat Daerah yang tercapai Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)	74.00		0.00		70		-		-		-		70		70		100.00%		0.00					
			Persentase risk register strategis perangkat daerah yang selaras dengan risk register strategis penda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)	100.00		0.00		0		-		-		-		-		-		0.00%		0.00					
			Persentase Program Perangkat Daerah yang tercapai Bidang Perekonomian dan SDA (Persen)	74.00		0.00		70		-		-		-		70		70		100.00%		0.00					
			Persentase Program Perangkat Daerah yang tercapai Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen)	74.00		0.00		70		-		-		-		70		70		100.00%		0.00					
			Persentase risk register strategis perangkat daerah yang selaras dengan risk register strategis penda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen)	100.00	2,073,930,964	0.00	739,680,466		363,052,874		36,985,000		41,980,000		70,511,400		162,666,048		312,142,448		85.98%		1,051,822,914		50.72%		
			Persentase Renja Selaras dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Persen)	100.00		0.00		100		-		50		100		-		100		100.00%		0.00					
			Persentase Renstra selaras dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Persen)	100.00		0.00		100		-		50		100		-		100		100.00%		0.00					
			Persentase Program Prioritas RPJMD yang terkawal dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Persen)	100.00		0.00		100		-		-		100		-		100		100.00%		0.00					
			Persentase Renja Selaras dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)	100.00		0.00		100		-		50		100		-		100		100.00%		0.00					
			Persentase Renja Selaras dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen)	100.00		0.00		100		-		50		100		-		100		100.00%		0.00					
			Persentase Program Prioritas RPJMD yang terkawal dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen)	100.00		0.00		100		-		-		-		100		100		100.00%		0.00					
			Persentase risk register strategis perangkat daerah yang selaras dengan risk register strategis penda Bidang Perekonomian dan SDA (Persen)	100.00		0.00		0		-		-		-		-		-		0.00%		0.00					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	SKPD Penanggungjawab	Keterangan								
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Rekomendasi hasil Money yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia (Persen)			75									75		75		100.00%		0.00		0.00%					
			Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia (Persen)		789,041,032	100		166,714,102		3,600,000			100				100		100.00%		0.00		0.00%		550,208,714	234.01%		
			Jumlah dokumen risk register pemerintah daerah yang tersusun tepat waktu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dokumen)			0													0.00%		0.00		0.00%					
			Jumlah Dokumen risk register perangkat daerah yang tersusun tepat waktu Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dokumen)			0													0.00%		0.00		0.00%					
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2.00	158,905,140	2.00	7,666,980	2	16,149,486	-	-	-	-	-	16,135,320	2	-	2	16,135,320	100.00%	99.91%	4.00	23,802,300	200.00%	14.98%		Tidak Ada	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1.00	166,647,762	2.00	12,409,142	1	6,180,652	-	-	-	-	-	491,200	1	5,678,400	1	6,169,600	100.00%	99.82%	3.00	18,578,742	300.00%	11.15%		Tidak Ada	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2.00	255,401,220	2.00	353,007,940	2	53,271,740	-	3,600,000	1	4,500,000	1	18,470,800	2	26,650,000	2	53,220,800	100.00%	99.90%	4.00	406,228,740	200.00%	159.06%		Tidak Ada	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1.00	208,086,910	2.00	36,053,604	1	91,112,224	-	-	-	-	-	1,304,080	1	64,241,248	1	65,545,328	100.00%	71.94%	3.00	101,598,932	300.00%	48.83%		Tidak Ada	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Rekomendasi hasil Money yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Persen)			75									75		75		100.00%		0.00		0.00%					
			Jumlah dokumen risk register pemerintah daerah yang tersusun tepat waktu Bidang Perekonomian dan SDA (Dokumen)		683,525,676		75,090,600		73,042,824		27,010,000		17,680,000		3,510,000		15,526,400		63,726,400		87.25%		138,817,000		67.50%			
			Jumlah Dokumen risk register perangkat daerah yang tersusun tepat waktu Bidang Perekonomian dan SDA (Dokumen)																0.00%		0.00		0.00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		17
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar bidang Perencanaan dan SDA (Persen)					100		-	-			100		-		100		100.00%		0.00		0.00%				
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2.00	313,260,738	2.00	42,988,400	1	59,451,650	-	24,310,000	1	12,200,000	1	1,530,000	1	12,286,400	1	50,326,400	100.00%	84.66%	3.00	93,314,800	150.00%	29.79%			Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan (Laporan)	1.00	152,140,000	1.00	15,455,000	1	3,301,458	-	-	1	1,080,000	-	1,080,000	-	1,130,000	1	3,290,000	100.00%	99.66%	2.00	18,745,000	200.00%	12.32%			Tidak Ada
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2.00	127,714,938	2.00	5,660,000	1	7,528,258	-	2,700,000	1	4,400,000	1	-	1	260,000	1	7,360,000	100.00%	97.76%	3.00	13,010,000	150.00%	10.19%			Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1.00	90,410,000	1.00	10,997,200	1	2,761,458	-	-	-	-	-	900,000	1	1,850,000	1	2,750,000	100.00%	99.99%	2.00	13,747,200	200.00%	15.21%			Tidak Ada
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Rekomendasi hasil Monev yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)					75		-	-			-		75		75		100.00%		0.00		0.00%				
			Jumlah dokumen risk register pemerintah daerah yang disusun tepat waktu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dokumen)		601,364,256		255,452,200		123,295,948		6,375,000		19,800,000		30,600,000		50,570,000		107,345,000	0.00%	87.06%		362,797,200		209.26%			
			Jumlah Dokumen risk register perangkat daerah yang disusun tepat waktu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dokumen)					0		-	-		-		-		-		-	0.00%		0.00		0.00%				
			Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)					100		-	-		100		-		100		100.00%		0.00		0.00%					
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2.00	116,203,606	1.00	20,274,000	1	20,848,388	1	1,575,000	-	-	-	6,750,000	-	11,088,000	1	19,413,000	100.00%	93.12%	2.00	39,687,000	100.00%	34.15%			Tidak Ada

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)		1.00	152.970.650	1.00	18.490.000	1	8.102.560	-	-	-	-	-	1	8.032.000	1	8.032.000	100.00%	99.13%	2.00	26.522.000	200.00%	17.34%		Tidak Ada	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (dokumen)		2.00	193.490.000	1.00	198.728.200	1	86.745.000	-	4.800.000	-	19.800.000	-	23.850.000	1	27.450.000	1	75.900.000	100.00%	87.50%	2.00	274.628.200	100.00%	141.93%		Tidak Ada
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)		1.00	138.700.000	1.00	17.960.000	1	7.600.000	-	-	-	-	-	1	4.000.000	1	4.000.000	100.00%	52.63%	2.00	21.960.000	200.00%	15.83%		Tidak Ada	
																				100.00%	85.98%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2024 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2025 (%)	SKPD Penanggungjawab	Keterangan									
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12	13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	17			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):																													

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah